

Tragedi Pelanggaran HAM di Masa Orde Baru: Pencarian Keadilan dan Keterbukaan

Fajar Nugroho¹, Bagus Gymnastiar², Moch Alfi Fahmi Azka³,

Affan Anshori Ma'ruf⁴, Didi Pramono⁵

Email: alfifahmi10@students.unnes.ac.id, bagusss12346789@students.unnes.ac.id,
affanmaruf@students.unnes.ac.id, fajarnugroho88@students.unnes.ac.id

Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis : alfifahmi10@students.unnes.ac.id

Abstract. *The purpose of this article is to explore the impact of human rights violations during the New Order period in Indonesia on the process of seeking justice. Through a qualitative research approach in the form of literature studies and content analysis, it is used to identify patterns of practices that inhibit openness in the Indonesian legal system. The results of the study highlight the importance of comprehensive legal reform to remedy this dark past, as well as to create a fairer and more transparent legal system for all citizens. The implication of this study is the need for concrete actions to strengthen independent and transparent law enforcement agencies and ensure that past human rights violations are prosecuted fairly. Thus, this article emphasizes the urgency to achieve greater justice in the Indonesian legal system.*

Keywords: *Human Rights, Human Rights Violations, New Order, Impact and Influence, Justice, Law*

Abstrak. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dampak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama masa Orde Baru di Indonesia terhadap proses pencarian keadilan. Melalui pendekatan penelitian kualitatif yang berupa studi literatur dan analisis isi konten, digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik yang menghambat keterbukaan dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian mencermati pentingnya reformasi hukum yang komprehensif untuk memperbaiki masa lalu yang kelam ini, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan bagi semua warga negara. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya tindakan konkret untuk memperkuat lembaga penegakan hukum yang independen dan transparan serta memastikan bahwa pelanggaran HAM di masa lalu dituntut secara adil. Dengan demikian, artikel ini menekankan urgensi untuk mencapai keadilan yang lebih besar dalam sistem hukum Indonesia.

Kata kunci: Hak asasi manusia, pelanggaran HAM, orde baru, dampak dan pengaruh, keadilan, hukum

1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya merupakan hak yang melekat secara alami dalam setiap individu sejak lahir, sesuai dengan pengertian ini, HAM dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia. Dikarenakan sifatnya sebagai anugerah Tuhan, tidak ada institusi atau kekuasaan yang berhak untuk mencabut hak tersebut, serta tidak ada kekuatan apapun yang boleh menghambatnya. Pendapat ini sejalan dengan gagasan yang pertama kali diperkenalkan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang alami. Oleh karena itu,

tidak ada kekuasaan di dunia yang memiliki wewenang untuk mencabut hak asasi setiap individu. HAM adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan, bukan sebagai pemberian dari manusia atau lembaga kekuasaan.

Di Indonesia, HAM memiliki ciri khasnya sendiri, dengan aspek teologis yang signifikan. Keyakinan bahwa HAM adalah pemberian ilahi dari Tuhan Yang Maha Esa menegaskan bahwa setiap individu menerima HAM sebagai anugerah. Ini menimbulkan tanggung jawab bagi semua pihak, termasuk negara, hukum, masyarakat, dan individu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut di semua situasi. HAM mencakup hak-hak dalam berbagai bidang, termasuk sipil, politik, sosial, dan ekonomi, serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Melanggar HAM sama artinya dengan mengurangi martabat manusia dan kemanusiaannya (Atmasasmita, 2007).

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dijamin dan diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Perlindungan ini kemudian diperkuat dan ditegakkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM) dan Undang- Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000 (UU Pengadilan Hak Asasi Manusia). Dalam rangka melindungi, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah organisasi yang setara dengan lembaga publik lainnya yang bertugas melakukan penelitian, konsultasi, pengawasan dan mediasi terkait permasalahan kemanusiaan. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk melindungi hak asasi manusia melalui konstitusinya, perlindungan hak asasi manusia mencapai puncaknya pada tahun 1993 dengan berdirinya PBB, Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia PBB dan penunjukan Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Indonesia merespons situasi ini dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menarik perhatian pada upaya internasional dan nasional untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Namun pada lima tahun pertama keberadaannya, Komnas HAM beroperasi di bawah rezim diktator yang menindas hak asasi manusia, sehingga saat itu Komnas HAM lebih hanya sekedar simbol ketimbang 2 organisasi yang amanah, independen, dan jujur dalam memperjuangkan hak asasi manusia izin dan melindungi hak asasi manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tindakan atau kelalaian, baik sengaja maupun tidak, yang mengurangi, menghambat, membatasi, atau mencabut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang kepada individu atau kelompok, tanpa jaminan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencegahan pelanggaran HAM dapat dilakukan usaha-usaha seperti memperkuat lembaga perlindungan hak asasi manusia,

peningkatan kesadaran hukum, dan sosialisasi peningkatan untuk mematuhi hukum (Wardati dkk, 2023).

Pada masa orde baru, cukup banyak pelanggaran HAM yang terjadi, salah satunya adalah penembak misterius atau petrus, petrus dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena mengadili individu tanpa proses hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun era Orde Baru telah berakhir, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa tersebut masih belum sepenuhnya diselesaikan. Situasi ini menjadi sumber trauma bagi masyarakat, dan oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi pemerintahan saat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang masih terbuka, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis HAM di Indonesia pasca Orde Baru berfokus pada dampak pelanggaran HAM masa lalu, upaya menuju keadilan, dan relevansi teori-teori sosial. Tragedi pelanggaran HAM seperti Peristiwa Tanjung Priuk, Trisakti, dan Semanggi meninggalkan luka mendalam dan menghambat pencarian keadilan. Sistem hukum yang korup dan lemah, intimidasi, serta budaya impunitas menjadi hambatan utama. Upaya menuju keadilan membutuhkan reformasi sistem hukum yang independen dan transparan, penguatan lembaga penegakan hukum, dan penegakan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berpolitik, dan pers. Teori Konflik Karl Marx relevan dalam memahami akar permasalahan, yaitu ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya. Membangun sistem hukum yang adil dan transparan, memperkuat peran sipil, edukasi HAM, dan membangun budaya anti-impunitas menjadi kunci utama. Teori Keadilan Transisi, Restorative Justice, dan Hak Asasi Manusia Universal dapat memperkaya pemahaman dan solusi. Penelitian lebih lanjut tentang kasus-kasus spesifik, peran aktor non-negara, dan perbandingan dengan negara lain yang melewati transisi serupa diperlukan untuk solusi yang komprehensif. Kajian ini memberikan landasan teoritis untuk memahami kompleksitas isu HAM di Indonesia pasca Orde Baru dan membuka jalan bagi penelitian dan solusi yang lebih komprehensif.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan metode penelitian artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan literature study dan menganalisis isi konten. Metode studi literatur merupakan serangkaian proses yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, membaca dan membuat catatan, serta mengelola data penelitian (Zed, 2008).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaruh Tragedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa Orde Baru dalam Upaya Pencarian Keadilan di Indonesia

Peristiwa Tanjung Priuk, Trisakti 12 Mei 1998, dan Peristiwa Semanggi pada 13 November 1998 merupakan contoh nyata dari rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Dalam Peristiwa Tanjung Priuk, demonstran yang berjumlah sekitar 1500 orang disambut dengan tembakan peluru dan bahkan dihantam dengan truk-truk militer, mengakibatkan korban jiwa mencapai 400 orang, termasuk para ulama yang ikut serta dalam demonstrasi. Sedangkan Trisakti 12 Mei 1998, dipicu oleh krisis moneter dan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden oleh MPR. Demonstrasi yang dimulai oleh Mahasiswa Trisakti berujung pada tragedi berdarah dengan banyaknya korban luka dan tewas, sementara Soeharto pada saat itu justru berada di KTT-G 15 di Mesir. Begitu juga dengan Peristiwa Semanggi, mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut reformasi dan menolak dwifungsi ABRI, namun direspon dengan kekerasan dari aparat yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan ironi dimana pemimpin negara yang 3 menyerukan perdamaian di forum internasional justru terlibat dalam pembantaian dan pelanggaran HAM di negerinya sendiri. Tragedi pelanggaran HAM di era Orde Baru telah memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pencarian keadilan di Indonesia. Masa tersebut dikenal dengan banyaknya insiden pelanggaran HAM, yang sebagian besar terjadi di bawah sistem penjara, sistem hukum, dan sistem pendidikan. Selama masa Orde Baru, pelanggaran HAM telah menimbulkan banyak korban, termasuk mereka yang menjadi korban penyiksaan, kasus yang tak terselesaikan, dan kasus yang masih berlanjut hingga kini. Pelanggaran HAM juga telah menyebabkan banyak kekerasan terhadap berbagai segmen masyarakat, termasuk masyarakat pribumi, buruh, dan agama. Upaya pencarian keadilan di Indonesia selama periode tersebut juga seringkali terhambat oleh pelanggaran hak, seperti hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, dan hak kebebasan pers. Pelanggaran tersebut telah menelan banyak korban, termasuk yang menjadi korban penyiksaan, kasus yang tak terselesaikan, dan kasus yang masih berlangsung.

Sebagai contoh, pelanggaran hak kebebasan beragama telah mengakibatkan banyak insiden kekerasan terhadap masyarakat pribumi, seperti yang terjadi di Aceh, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Pelanggaran hak kebebasan politik juga telah menimbulkan banyak korban, termasuk yang mengalami penyiksaan, kasus yang tidak diselesaikan, dan

kasus yang masih berlangsung. Selama masa Orde Baru, usaha pencarian keadilan di Indonesia telah sering kali terhambat oleh pelanggaran hak, termasuk hak kebebasan pers. Pelanggaran ini telah menyebabkan banyak korban, termasuk yang menjadi korban penyiksaan, kasus yang tidak selesai, dan kasus yang masih berlanjut. Tragedi pelanggaran HAM di era Orde Baru telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap upaya pencarian keadilan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa usaha pencarian keadilan di Indonesia telah sering kali terhalang oleh pelanggaran, yang umumnya terjadi di bawah sistem penjara, sistem hukum, dan sistem pendidikan.

Sebagai solusi, diperlukan tindakan yang lebih kuat untuk memperbaiki sistem penjara, sistem pengelolaan hukum, dan sistem pendidikan di Indonesia. Ini termasuk perbaikan sistem penjara yang lebih transparan dan efektif, perbaikan sistem pengelolaan hukum yang lebih independen dan bebas dari politik, dan perbaikan sistem pendidikan yang lebih efektif dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, langkah-langkah yang lebih tegas diperlukan untuk mengadvokasi hak asasi manusia di Indonesia. Ini meliputi upaya untuk memperjuangkan hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, dan hak kebebasan pers. Memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia diharapkan dapat mengubah kondisi saat ini yang masih dipenuhi dengan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Untuk mewujudkan perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret untuk memperbaiki sistem penjara, sistem hukum, dan sistem pendidikan. Ini mencakup perbaikan sistem penjara yang lebih transparan dan efisien, reformasi sistem hukum yang lebih mandiri dan bebas dari campur tangan politik, serta perbaikan sistem pendidikan yang lebih efektif dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Langkah-langkah yang lebih tegas ini juga termasuk dalam upaya untuk memperjuangkan hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, dan hak kebebasan pers. Memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi situasi saat ini yang masih dipenuhi dengan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru.

Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan teori konflik dari Karl Marx karena menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang menciptakan konflik antara penguasa dan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan Orde Baru dipandang sebagai pemegang kekuasaan yang menindas masyarakat, terutama melalui pelanggaran hak asasi manusia yang menghasilkan ketidakadilan sosial dan politik.

Langkah-langkah solusi yang disarankan, seperti reformasi sistem hukum dan peningkatan kebebasan pers, mencerminkan upaya untuk merombak struktur kekuasaan yang tidak seimbang tersebut, yang sesuai dengan tujuan teori konflik untuk mencapai perubahan sosial melalui konfrontasi dan perjuangan.

b. Dampak Pelanggaran HAM Selama Masa Orde Baru Terhadap Proses Pencarian Keadilan Bagi Korban dan Keluarga

1. Sub-Sub judul

Tragedi pelanggaran HAM di era Orde Baru telah membawa dampak signifikan terhadap upaya pencarian keadilan di Indonesia. Pelanggaran tersebut, yang terutama terjadi di bawah sistem penjara, sistem hukum, dan sistem pendidikan, telah menyebabkan banyak korban yang mengalami penyiksaan dan kasus yang tak terselesaikan. Selain itu, pelanggaran HAM juga telah menciptakan kekerasan terhadap berbagai segmen masyarakat, termasuk masyarakat pribumi, buruh, dan agama. Usaha pencarian keadilan seringkali terhambat oleh pelanggaran hak, seperti hak kebebasan beragama, hak kebebasan berpolitik, dan hak kebebasan pers. Sebagai solusi, diperlukan tindakan yang lebih kuat untuk memperbaiki sistem penjara, sistem pengelolaan hukum, dan sistem pendidikan di Indonesia, serta upaya yang lebih tegas dalam mengadvokasi hak asasi manusia. Langkah-langkah ini mencakup reformasi sistem penjara yang lebih transparan, sistem hukum yang lebih independen, dan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan ini dapat dikaitkan dengan teori konflik Karl Marx, yang menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya antara pemerintah dan masyarakat, serta menekankan pentingnya perubahan sosial melalui konfrontasi dan perjuangan.

Langkah-langkah solusi yang diusulkan juga mencerminkan upaya untuk merombak struktur kekuasaan yang tidak seimbang, sesuai dengan tujuan teori konflik Karl Marx. Reformasi sistem hukum yang lebih independen dan transparan bertujuan untuk mengurangi dominasi pemerintah dan memperkuat perlindungan hak individu, sementara peningkatan kebebasan pers akan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik dan mengungkapkan pendapat tanpa takut akan represi. Di samping itu, perbaikan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan memberikan akses yang lebih luas akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif. Memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia melalui langkah-langkah konkrit ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam mengatasi situasi yang masih dipenuhi dengan pelanggaran HAM

pada masa Orde Baru. Dengan demikian, melalui kombinasi perbaikan sistem dan advokasi hak asasi manusia, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua warganya.

Dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru juga berpengaruh besar terhadap proses pencarian keadilan bagi korban dan keluarganya. Para korban dan keluarga sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan, karena sistem hukum yang korup dan tidak transparan sering kali tidak mampu menyediakan rekompensasi yang memadai atau menghukum pelaku secara adil. Pelanggaran HAM ini juga menciptakan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya, yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun akibat ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus dengan cepat dan adil. Selain itu, intimidasi dan tekanan dari pihak berwenang sering kali menghambat upaya korban dan keluarganya untuk mencari keadilan, mengakibatkan penundaan dan bahkan penutupan kasus tanpa penyelesaian yang memuaskan. Dengan demikian, dampak pelanggaran HAM ini tidak hanya berdampak secara langsung terhadap korban, tetapi juga mempengaruhi proses pencarian keadilan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya. Penyelesaian pelanggaran HAM menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. Jika pelanggaran HAM bisa diselesaikan secara adil, maka ini menandakan Indonesia siap melindungi rakyatnya yang memperjuangkan HAM. Investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apabila pelanggaran tersebut dapat ditangani secara adil, hal ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam mempertahankan hak-hak rakyatnya yang berjuang untuk keadilan. Investigasi yang komprehensif terhadap pelanggaran HAM menjadi kunci penting bagi negara Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM yang universal. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan bertanggung jawab untuk mengatasi serta memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

c. Pelanggaran HAM di masa Orde Baru Menghambat Tercapainya Keterbukaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat publik, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaiannya yang mengurangi, merintangi, membatasi atau menahan hak asasi seseorang atau sekelompok orang secara melawan hukum yang dijamin oleh undang-undang. HAM adalah

persoalan yang selalu menjadi suatu noda yang tak pernah hilang di negara Indonesia ini. Selalu dan selalu hal tersebut terulang bagaikan rentetan peluru yang tak ada habisnya.

Pada era Orde Baru di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan diktator yang berkuasa. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto sering menggunakan kekuasaannya untuk menekan oposisi politik, membatasi kebebasan berekspresi, dan melakukan penangkapan serta penghilangan paksa terhadap aktivis. Pelanggaran hak asasi manusia ini menimbulkan ketakutan dan intimidasi, sehingga menghambat berkembangnya keterbukaan dan transparansi dalam 6 sistem hukum Indonesia. Kondisi ini berdampak pada independensi lembaga hukum dan menghilangkan proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru menciptakan pola praktik yang mengutamakan kekuasaan politik dibandingkan keadilan. Hal ini tercermin dalam prosedur hukum yang seringkali tidak adil, dimana kasus-kasus politik cenderung diselesaikan secara sepihak demi kepentingan rezim. Penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya menghambat transparansi sistem peradilan namun juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap otoritas peradilan. Sistem hukum yang buram dan terbuka juga dibentuk oleh keterlibatan politik yang mendalam dalam proses hukum. Campur tangan politik dalam penegakan hukum seringkali berujung pada tidak adanya netralitas dan distorsi keadilan. Keberhasilan seseorang dalam sistem peradilan sering kali lebih bergantung pada koneksi politiknya dibandingkan keadilan dan kebenaran. Hal ini merugikan masyarakat secara keseluruhan karena berujung pada ketimpangan akses terhadap keadilan. Untuk membangun sistem hukum yang lebih terbuka dan transparan, penting untuk memperbaiki masa lalu kelam ini. Reformasi hukum yang komprehensif, termasuk memperkuat lembaga penegakan hukum yang independen dan transparan serta memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu terdeteksi dan dituntut secara adil, merupakan langkah penting. Hanya dengan memperbaiki masa lalu kelam inilah Indonesia dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih adil, terbuka dan transparan bagi seluruh warga negaranya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa Orde Baru di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pencarian keadilan bagi korban dan keluarga, serta menghambat tercapainya keterbukaan dalam sistem hukum Indonesia. Tragedi pelanggaran HAM seperti Peristiwa Tanjung Priuk, Trisakti 12 Mei 1998, dan Peristiwa Semanggi pada 13 November 1998 adalah contoh nyata dari ketidakadilan yang terjadi di bawah rezim otoriter tersebut. Pelanggaran HAM ini menghasilkan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarganya, serta sering kali menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan keadilan akibat sistem hukum yang korup dan tidak transparan. Selain itu, intimidasi dan tekanan dari pihak berwenang sering kali menghalangi upaya pencarian keadilan, yang berujung pada penundaan atau bahkan penutupan kasus tanpa penyelesaian yang memuaskan. Langkah-langkah solusi yang diusulkan mencakup reformasi sistem hukum yang lebih independen dan transparan, perbaikan sistem penjara, serta memperjuangkan hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berpolitik, dan pers. Selain itu, permasalahan ini juga dapat dikaitkan dengan teori konflik Karl Marx, yang menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan dan distribusi sumber daya antara pemerintah dan masyarakat, serta pentingnya perubahan sosial melalui konfrontasi dan perjuangan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih konkret dan bertanggung jawab, termasuk memperbaiki masa lalu kelam pelanggaran HAM, memperkuat lembaga penegakan hukum yang independen, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditangani secara adil dan transparan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih terbuka dan merata bagi seluruh warga negaranya.

DAFTAR REFERENSI

- Alqivari, A. M. I. (2023, November 10). Kasus Pembunuhan Aktivis Ham Masa Lalu Yang Belum Menemukan Titik Terang. *Fakultas Hukum*. Retrieved from <https://law.uad.ac.id/kasus-pembunuhan-aktivis-ham-masa-lalu-yang-belum-menemukan-titik-terang/>
- Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(2), 77-87.
- Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2799-2807.
- Suhendarto, B. P. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia (Doctoral dissertation, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG).

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.

Ulya Maylani, Damai Vistiani Gulo, Farhan Luthfi Azidan. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1, 12-18.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.